



KABUPATEN BENGKULU UTARA

RABU, 15 JANUARI 2020

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Mega Proyek Jembatan Rp 28 M

MANGKRAK

LAIS - Mega proyek penggantian jembatan besi A menjadi jembatan Cable Stayed (CS) di Desa Air Padang Kecamatan Lais Bengkulu Utara hingga kini tak tuntas. Bahkan terkesan jalan di tempat atau mangkrak. Proyek senilai Rp 28,5 miliar tersebut tak ada aktivitas pengerjaan. Tak ada satupun pekerja di sana. Pantauan RB, pembangunan yang dilakukan baru sebatas tiga pondasi jembatan. Itupun pembangunan pondasi seperti baru selesai dilakukan pengecoran. Hal ini terlihat dengan masih terpasangnya kayu penyangga cor beton pondasi.

Selain itu bagian atas pondasi masih terdapat besi-besi runcing yang belum dilanjutkan dengan pembangunan slop. Diperkirakan pembangunan fisik hingga kini masih di bawah 70 persen. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT Adhitya Mulia Mitra Sejajar (AMMS) tersebut tertulis habis masa kontrak 31 Desember. Di lokasi juga terdapat dua alat berat jenis crane lengkap dengan beton cor pembatas. Namun beton-beton pembatas tersebut belum dipasang dan masih berjajar rapi di badan jalan meski tak ada pengerjaan dan aktifitas pekerja di lokasi. "Terkait hal itu, Kepala Satker Kementerian PUPR Wilayah I Provinsi Bengkulu Abdul Halim, ST, MT mengakui jika proyek tersebut memang tak selesai sesuai kontrak awal 31 Desember. Kini

sesuai haknya kontraktor mendapatkan masa perpanjangan dengan konsekuensi denda selama 50 hari pertama. "Dan kalau belum selesai dan kita nilai progresnya bagus, kontraktor berhak meminta perpanjangan kedua selama 90 hari," terangnya. Namun jika memang dalam masa perpanjangan waktu pertama 50 hari dinilai progresnya tidak bagus. Maka ia memastikan tidak akan melakukan perpanjangan waktu kedua. Ia juga membantah tidak tuntasnya pekerjaan per 31 Desember lantaran gagalnya perencanaan pembangunan. Tidak tuntasnya pengerjaan lantaran kontraktor dari PT AMMS dinilai lambat dalam melaksanakan pekerjaan. "Penetapan waktu kontrak selama 266 hari kalender itu sudah sangat cukup dengan pertimbangan kondisi cuaca. Namun kontraktor kita akui lambat dalam melakukan pekerjaan,"

terangnya. Bahkan dalam masa kontrak ia mengaku jika sudah menerbitkan surat peringatan pada kontraktor terkait lambatnya progres pembangunan. Proyek ini juga masuk dalam proyek dengan masa kontrak kritis lantaran progres perbulannya tidak sesuai dengan harapan. "Kalau memang saat ini di lokasi juga tidak ada aktifitas pekerja lagi, saya akan minta PPK cek ke lokasi dan kirim lagi surat teguran," tegasnya. Sementara Sekretaris Komisi III DPRD BU Edi Afrianto meminta aparat memantau pelaksanaan proyek tersebut. Hal ini menghindari terjadi pelanggaran yang menyebabkan proyek tidak tuntas. Sedangkan proyek tersebut bersumber dari pemerintah pusat bagi masyarakat BU. "Jalan tersebut saya minta dikerjakan dengan serius, jangan sampai tidak selesai karena itu untuk masyarakat BU," tegasnya. (qia)